

BAB III

JATI DIRI MANUSIA DALAM AKUNTANSI PANCASILA

“...the ‘global convergence of IFRS’ be seen as one measure of the success of the project to universalize the commodity-form and *homo economicus*”
(Samuel dan Manassian, 2011)

3.1 Pengantar

Saya tertarik pada pernyataan Samuel dan Manassian (2011) yang menyatakan bahwa terdapat proyek untuk menstandarisasi akuntansi dan asumsi manusia. Pada satu sisi, pernyataan tersebut menggambarkan bahwa manusia dan akuntansi merupakan “komoditas” dalam aktivitas perekonomian. Sementara itu, pada sisi lainnya, pernyataan tersebut juga menggambarkan adanya keinginan untuk menyamakan kedudukan manusia (dan akuntansi) melalui IFRS yang notabene merupakan hasil dari PAT. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan manusia untuk dijadikan sebagai komoditas dalam aktivitas perekonomian. Pertanyaan ini tentu juga menyangkut kelayakan *homo economicus* sebagai standar kehidupan manusia, khususnya bagi negara yang tidak menganut ideologi kapitalisme.

Kita perlu menyadari bahwa aspek manusia tidak lepas dari landasan ideologi negara. Jika *homo economicus* diterapkan pada negara yang tidak bercorak kapitalis, terjadilah perubahan ideologi sesuai dengan filosofi tersebut (Samuel dan Manassian, 2011; Tinker et al., 1982). Jika *homo economicus* menjadi roh dalam standar kehidupan manusia, terjadilah pergeseran standar ideologi negara (Swasono, 2014). Jika penggunaan asumsi manusia sebagai

homo economicus dalam negara di luar paham kapitalisme, khususnya Pancasila, terjadilah penjajahan ideologi (Wallace, 1997; Sy dan Tinker, 2013).

Bab ini menguraikan asumsi manusia sebagai *homo pancasilaus* pada aspek kehidupan, khususnya perekonomian. Terdapat beberapa aspek dari *homo economicus* yang dilakukan pembongkaran dan diganti dengan asumsi baru demi mewujudkan hakikat manusia seutuhnya. Asumsi tersebut kemudian membentuk manusia baru yang disebut dengan *homo pancasilaus* (manusia yang menjunjung tinggi Pancasila). Asumsi manusia sebagai *homo pancasilaus* diharapkan dapat membentuk filosofi perekonomian (dan akuntansi) yang utuh.

Dalam merumuskan *homo pancasilaus*, saya menggunakan lima nilai utama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut diformulasikan dalam tahapan *homo pancasilaus*. Saya melihat bahwa kelima nilai tersebut sejatinya memiliki hubungan yang saling terkait dalam membentuk tahapan. Oleh karena itu, saya mengaitkan lebih dari satu nilai untuk membentuk karakteristik *homo pancasilaus*.

Asumsi manusia tidak bisa lepas dari filosofi dan konsep akuntansi yang menyertainya. Manusia dan akuntansi memiliki hubungan saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini selalu mengaitkan aspek manusia beserta konsekuensinya terhadap akuntansi dan sebaliknya.

3.2 Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan: Sesungguhnya Manusia adalah *Nothing*

“Siapakah aku? Siapakah kita? Siapakah manusia sesungguhnya?” Pertanyaan ini seharusnya dijawab ketika kita menentukan asumsi manusia. Asumsi ini pada dasarnya menentukan hakikat diri dan keberadaan manusia hingga kemudian berujung kepada aksiologi kehidupan, khususnya akuntansi. Pertanyaan ini juga menentukan tujuan kehidupan manusia dalam beraktivitas dan

berinteraksi dengan unsur lain dalam kesadarannya. Ada manusia yang berpatokan kepada materi sebagai tujuan kehidupan sehingga dirinya menjadikan unsur tersebut sebagai indikator kesuksesan. Sebaliknya, ada manusia yang benar-benar lepas dari bayang-bayang materi sehingga hanya menggantungkan hidupnya pada keberadaan Tuhan dan alam semesta. Masing-masing dari mereka memiliki kesadaran yang berbeda mengenai realitas keberadaan dirinya dan berimplikasi kepada aksi yang tidak sama.

Terdapat konsep menarik apabila kita mencermati keberadaan manusia dalam perspektif PAT dan laba. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, keberadaan PAT dan laba tidak lepas dari asumsi *homo economicus* yang menuntut manusia untuk mengejar kesempatan dalam memaksimalkan nilai materi pada kehidupannya. Setiap manusia dipandang selalu mengejar kesempatan dalam aktivitas ekonomi bagi keuntungan pribadinya. Kesempatan merupakan aktivitas utama manusia yang telah terpatrit dalam konsep ekonomi, khususnya PAT dan laba. PAT berusaha memberikan kesempatan bagi manusia seluas-luasnya untuk mengejar laba. Konsekuensinya, akuntansi harus menjadi alat untuk memperbesar kesempatan bagi manusia dalam mengejar keuntungan, baik melalui standar regulasi, alat ukur, maupun pengembangan keilmuan. Sebaliknya, akuntansi diharamkan menjadi penghalang bagi setiap manusia dalam mengejar keuntungan tersebut.

Aktivitas perekonomian yang hanya mengejar kesempatan membuat manusia dan akuntansi terjerumus ke dalam unsur materi semata. Manusia menjadi lupa bahwa terdapat sejumlah indikator lain yang terwujud dalam unsur nonmateri dan berpengaruh terhadap kehidupannya. Apakah hanya lupa semata? Manusia bukan hanya melupakan unsur materi, melainkan juga dididik untuk melakukan hal tersebut. Pendidikan akuntansi berbasis pasar menjadikan

manusia sebagai pribadi yang bersifat oportunistik dalam kegiatan ekonomi dan menegasikan unsur-unsur lainnya (Triyuwono, 2010).

Konsep *homo economicus* yang menjadi acuan utama bagi PAT dan konsep laba sejatinya hanya menciptakan manusia sebagai sebuah mesin belaka (Alfia, 2015). Manusia dipacu untuk terus-menerus meningkatkan nilai materi yang dimilikinya hanya untuk memenuhi nafsu belaka. Nafsu merupakan puncak dari keinginan manusia dalam memenuhi kepentingan pribadinya (*self interest*) dalam pemikiran PAT (Triyuwono, 2006; Lamberton, 2015).

Hal ini tentu menjadi keterbalikan dengan jati diri Pancasila. Jati diri Pancasila sesungguhnya terletak pada kesadaran bahwa manusia adalah *nothing* (bukanlah apa-apa) dalam kehidupannya. Manusia haruslah sadar bahwa keberadaan dirinya merupakan anugerah Tuhan sebagai bagian utama dalam alam kehidupan. Hal inilah yang ditegaskan oleh Soekarno (1945) selaku *founding father* Pancasila yang menekankan bahwa sejatinya Tuhan adalah puncak dari peradaban manusia. Jika demikian, manusia sejatinya tidak dibenarkan memiliki ambisi untuk mengejar materi dalam aktivitas perekonomian. Materi sebagai representasi hanya memancing manusia untuk mengutamakan ego dan meniadakan realitas keberadaan Tuhan (Hines, 1988; Chiapello, 2007).

Manusia juga harus menyadari bahwa dirinya tidak bisa berdiri tanpa bantuan dari sesamanya. Manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain sejak dirinya lahir hingga mati sekalipun. Hal ini juga berlaku dengan aktivitas ekonomi dan akuntansi yang tidak dapat berdiri sendiri jika hanya dilakukan oleh satu individu semata. Oleh karena itu, manusia sejatinya tidak diperkenankan memiliki ambisi yang mengutamakan sifat egoistik dan melupakan keberadaan sesamanya (Lehman, 2014; Triyuwono, 2015b). Inilah bentuk kesadaran manusia terhadap sesama dalam perspektif Pancasila. Kesadaran seperti ini adalah hakikat bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang berketuhanan (Soekarno, 2001).

Selain kedua dimensi tersebut, terdapat alam semesta yang sejatinya mempertegas kedudukan manusia sebagai pribadi *nothing*. Tuhan telah menganugerahkan alam semesta yang begitu dahsyatnya supaya manusia dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Manusia tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi (dan akuntansi) ketika alam semesta tiada dalam kehidupannya. Kerusakan alam semesta selama ini terjadi karena manusia (dan landasan paradigma akuntansi) mengutamakan nafsu pribadinya dalam aktivitas perekonomian dan akuntansi (Ahmar dan Kamayanti, 2011; Triyuwono, 2015c). Oleh karena itu, manusia sejatinya menempatkan alam semesta seperti dirinya sendiri dalam setiap aspek kehidupan.

Saya menyadari bahwa manusia memiliki *freewill* sebagai bentuk kedaulatan dalam melakukan pengambilan keputusan. Manusia memang memiliki hak untuk memisahkan dirinya dari keberadaan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Meskipun demikian, konsep *freewill* tersebut seharusnya tidak diarahkan kepada hal-hal yang berorientasi kepada nafsu, terutama dalam konsep materi. Manusia seharusnya menggunakan kebebasan yang dimiliki dengan berorientasi kepada Tuhan, sesama, dan alam semesta. Dengan kata lain, *freewill* yang dimiliki oleh manusia sejatinya memiliki batasan oleh hikmat dan kebijaksanaan demi kebermaslahatan setiap elemen kehidupan (Waldron, 2010; Latif, 2012; Lehman, 2014). Oleh karena itu, sila keempat Pancasila hadir sebagai bentuk penekanan terhadap orientasi tersebut dengan menggunakan hikmat dan kebijaksanaan dalam batin manusia.

Manusia dalam perspektif Pancasila tidak memandang kebebasan yang dimilikinya layaknya pemikiran kapitalisme. Manusia dalam perspektif Pancasila berani mengorbankan segala miliknya demi kepentingan bersama dan kemaslahatan (Salampessy, 2011). Keberadaan dirinya sebagai individu dalam aktivitas perekonomian bukanlah hal utama karena baginya Tuhan, sesama, dan

alam semesta jauh lebih penting (Cahyanto dan Parikesit, 2011). Selama ketiga dimensi tersebut terpenuhi, manusia rela menanggalkan dirinya demi meraih kemaslahatan (Sitorus, 2016a). Sifat rela berkorban seperti inilah yang tidak dimiliki dalam konsep manusia sebagai *homo economicus* dan tentunya harus dilakukan perombakan untuk mewujudkan sosok *homo pancasilaus*.

Jika demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa *self interest* yang terdapat dalam roh PAT sesungguhnya bertentangan dengan Pancasila. Sifat ini hanya memunculkan manusia sebagai sosok AKU dan meniadakan unsur-unsur lain dalam kehidupan. Bahkan, *self interest* pada akhirnya membawa manusia dalam lingkungan dunia fana dan meniadakan dimensi keabadian sejati dalam wujud nonmateri (Triuwono, 2012). Dengan demikian, sosok AKU sesungguhnya hanya membutakan manusia dalam jati diri kehidupannya. Sosok AKU inilah yang kemudian menimbulkan keterpisahan antara manusia, Tuhan dan alam semesta (Triuwono, 2006).

Sifat *self interest* sejatinya hanya melahirkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jatuhnya bangsa sesungguhnya bukan disebabkan oleh pengaruh luar, melainkan karena setiap elemen masyarakat memikirkan kehendak pribadinya. Selain itu, timbulnya kesenjangan sosial dalam negara disebabkan oleh masing-masing pelaku ekonomi yang hanya berhasrat untuk memenuhi kesejahteraan pribadinya dan meniadakan unsur-unsur masyarakat lainnya (Latif, 2012). Sifat inilah yang dihindari oleh Pancasila dalam menanamkan landasan tata kehidupan bermasyarakat, khususnya pada aspek perekonomian. Kebersamaan merupakan kunci dalam aspek berlangsungnya kehidupan bangsa, terutama ketika hal ini dikaitkan dengan sistem perekonomian.

Jika *self interest* saja dapat bersifat menghancurkan, bagaimana dengan keuntungan yang notabene merupakan bawaan dari sifat tersebut? Bukankah keuntungan dalam perspektif PAT berpatokan kepada unsur materi sehingga

mereduksi manusia dalam memandang setiap unsur kehidupan (Mulawarman, 2013b)? Bukankah keuntungan dalam perspektif PAT merupakan produk dari sistem kapitalisme yang bertujuan untuk memberikan ruang kekuasaan bagi negara maju melalui sistem ekonomi (Irianto, 2010; Kusdewanti *et al.*, 2014)? Bukankah keuntungan dalam perspektif PAT timbul dari segala hal yang terstandardisasi (Watts dan Zimmerman, 1986) sehingga pada akhirnya mematikan unsur kearifan lokal dalam diri manusia? Oleh karena itu, saya dapat mengatakan bahwa keuntungan dalam perspektif PAT justru hanya membawa kehancuran bagi peradaban manusia.

Tulisan dari Sitorus *et al.* (2016) setidaknya memberikan penyadaran bahwa keuntungan akuntansi yang bersumber dari *self interest* sejatinya merupakan dosa. Mereka melihat bahwa keuntungan dalam perspektif PAT yang notabene sebagai patokan utama dalam aktivitas bisnis dan perekonomian sesungguhnya membuat ideologi kapitalisme semakin merajalela. Selain itu, mereka juga memandang bahwa keuntungan dalam perspektif PAT hanya memunculkan aspek penjajahan baru pada aktivitas perekonomian. Hal demikian juga disetujui oleh Setiawan dan Kamayanti (2012) yang memandang bahwa aspek keuntungan justru memancing manusia untuk melakukan kecurangan keuangan. Oleh karena itu, sifat manusia sebagai *nothing* sangat diperlukan untuk meniadakan *self interest* dan keuntungan dalam perspektif PAT serta menciptakan kebersamaan dalam aktivitas perekonomian.

Kedudukan manusia sebagai *nothing* memiliki konsekuensi terhadap sikap merendahkan hati dalam menjalani peran kehidupannya. Sikap merendahkan hati tersebut membawa manusia dalam bentuk kesadaran kebersamaan dalam paradigma kehidupan. Dalam perkataan lain, manusia harus mengubah konsep AKU menjadi KITA dalam paradigma kehidupan untuk mewujudkan *homo pancasilaus* sesungguhnya. AKU bukanlah apa-apa tanpa adanya KITA sebagai

sebuah organ yang menyatu dan saling berpengaruh satu sama lain. Sebaliknya, konsep KITA menimbulkan konsekuensi bahwa kesadaran tidak bisa dinikmati oleh kalangan pribadi semata, tetapi atas usaha bersama menuju kemaslahatan.

Sikap *nothing* seharusnya terdapat dalam pengembangan akuntansi, baik dalam level teori maupun praktik. Kita harus menyadari bahwa pengembangan konsep akuntansi tidak lepas dari karakteristik manusia dan sebaliknya. Akuntansi dan manusia memiliki keterkaitan yang erat, bahkan dimulai dari tingkat definisi (Sitorus, 2015). Keduanya merupakan aspek realitas yang tidak terpisah satu sama lain, baik dalam tingkat fisik maupun sebaliknya (Kamayanti, 2009). Kesadaran terhadap hal ini sejatinya turut mendorong akuntansi yang memiliki kesadaran kerendahan hati, mulai dari paradigma, ontologi, hingga aksiologi (Triyuwono, 2006; Molisa, 2011).

Jika demikian, kita dapat mengatakan bahwa sifat *nothing* harus terinternalisasi dalam diri manusia dan akuntansi. Manusia tidak akan mengubah pandangannya ketika akuntansi masih berasumsikan kepada nilai egoisme. Sebaliknya, akuntansi yang utuh hanya sekadar omong kosong ketika manusia masih berlandaskan kepada oportunisme materi. Perubahan mendasar terhadap landasan berpikir manusia dan akuntansi harus dilakukan secara beriringan untuk mewujudkan *nothing*.

3.3 Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan: Manusia sebagai Pribadi Amanah

Sifat amanah menjadi terabaikan dalam asumsi manusia sebagai *homo economicus* dan pengembangan konsep laba. Manusia dalam perspektif *homo economicus* dibentuk menjadi pribadi yang ambisius terhadap segala sesuatu yang dimiliki sehingga lupa bahwa segalanya merupakan titipan (Triyuwono, 2012; 2015b). Manusia dibentuk untuk selalu berfokus pada perolehan materi dan lupa bahwa di balik hal tersebut terdapat sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan (Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016). Akhirnya, setiap manusia saling bersaing satu sama lain demi memperebutkan materi (Tinker, Merino dan Neimark, 1982). Oleh karena itu, persaingan manusia dalam aktivitas perekonomian menjadi hal yang lumrah untuk dijumpai.

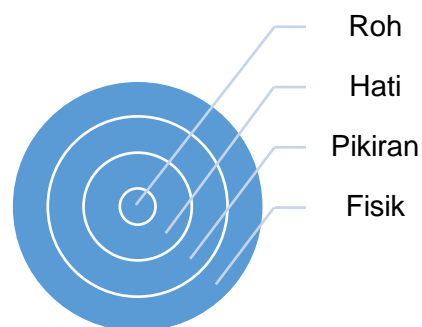
Pengabaian terhadap amanah menimbulkan kesombongan dan kebahagiaan semu terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Manusia dikatakan bahagia apabila memiliki kekayaan materi sebesar-besarnya dan dalam konteks ekonomi, timbul penimbunan sebesar-besarnya terhadap unsur tersebut (Chiapello, 2007; Schneider, 2012; Tinker, 2014). Kebahagiaan ini menimbulkan kebanggaan manusia ketika memiliki materi dalam jumlah melimpah tanpa peduli keberadaan sesamanya (dan Tuhan serta alam semesta) dalam aktivitas perekonomian. Inilah kesombongan dari manusia yang diwujudkan dalam bentuk PAT (Sitorus, 2015; Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016).

Kita harus menyadari bahwa saat manusia mengklaim dirinya sebagai *nothing*, maka segala sesuatu yang dimilikinya merupakan amanah dari Tuhan. Disadari atau tidak, Tuhan sejatinya merupakan peran utama dalam aktivitas perekonomian meskipun dalam dunia PAT dan laba keberadaannya termarginalkan (Sitorus, 2015). Ketika manusia memiliki jati diri sebagai *nothing*, dirinya harus menyadari keberadaan Tuhan sebagai puncak tertinggi realitas kehidupan. Konsekuensinya, manusia dalam perspektif *nothing* harus menyadari

bahwa dirinya tidak berarti apa-apa tanpa adanya keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, kesombongan dan kebahagiaan terhadap materi tidak berlaku bagi jati diri manusia sebagai *nothing*.

Tuhan telah menganugerahkan jati diri manusia dalam wujud pribadi (*self*) sebagai amanah untuk melakukan aktivitas yang berpusat kepada-Nya. Pribadi manusia bukan hanya terwujud dalam realitas fisik (*nafsu*) semata, tetapi terdapat unsur lain yang bersifat saling melengkapi, yaitu akal, hati, dan roh (Triuwono, 2015c). Bahkan, unsur fisik sejatinya hanyalah bagian terluar dalam diri manusia (lihat Gambar 3.1). Unsur paling utama dalam struktur diri manusia sejatinya adalah roh, di mana hati nurani manusia bersemayam (Triuwono, 2010). Oleh karena itu, manusia tidak seharusnya memandang realitas fisik semata dalam dirinya sebagai perwujudan amanah kepada Tuhan sebagai pribadi. Hal ini tentunya juga berlaku dalam landasan paradigma akuntansi yang juga menuntun manusia masuk dalam unsur terdalam (roh) pada dirinya.

Gambar 3.1 Struktur Diri (*Self*) Manusia



Sumber: Triuwono (2015b) dengan Ilustrasi

Tuhan juga telah mengamanahkan keberadaan sesama manusia sebagai sarana untuk melakukan aktivitas perekonomian yang berpusat kepada-Nya. Manusia sejatinya diciptakan saling berdampingan satu sama lain untuk bekerja sama menciptakan aktivitas perekonomian yang utuh. Manusia tidak boleh memikirkan kepentingannya sendiri karena sejatinya dirinya adalah makhluk sosial

dan beradab (Latif, 2012). Ketika kepentingan pribadi (*self interest*) ditonjolkan dalam aktivitas perekonomian, hanya kalangan tertentu semata yang menikmati hasil dari kegiatan tersebut. Hal ini juga merupakan landasan bagi manusia untuk tidak saling bersaing dalam aktivitas perekonomian (Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016).

Kita juga tidak boleh lupa alam semesta yang selama ini digunakan dalam aktivitas perekonomian adalah amanah dari Tuhan. Manusia tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi tanpa adanya peran alam semesta sebagai sumber produksi. Implikasinya, manusia juga harus memberlakukan alam semesta seperti dirinya sendiri sebagai rasa syukur atas amanah dari Tuhan.

Keterpisahan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta juga dapat dikatakan sebagai akibat dari terlupakannya amanah dalam pengembangan akuntansi. Manusia menjadi lupa terhadap jati diri sesungguhnya ketika amanah terhapus dalam pola pikir kehidupan. Implikasinya, sistem ekonomi maupun akuntansi juga hanya berfokus pada *self interest* dan melupakan amanah. Oleh karena itu, (akuntansi) Pancasila hadir untuk memiliki amanah yang berpusat kepada ketiga unsur tersebut demi kemaslahatan.

Kemudian, bagaimana perwujudan amanah dalam perspektif Pancasila? Soekarno (1964) sebagai *founding father* dari Pancasila meletakkan dasar amanah tersebut dalam rumusan Trisakti. Pertama, berdaulat dalam bidang politik. Masyarakat Indonesia harus memiliki jati diri dalam bidang politik tanpa mengurangi keberadaan negara lain. Kedaulatan tersebut ditunjukkan dengan penggunaan Pancasila sebagai landasan ideologi dalam sistem politik. Hal ini juga berlaku pada konteks akuntansi dalam posisinya sebagai ideologi ekonomi (Sitorus, 2015). Kedudukan akuntansi sebagai ideologi tentu juga mencerminkan sistem politik (Irianto, 2006; Amir, 2012; Arnold, 2012) dan kedaulatan negara.

Kedigdayaan PAT dan laba yang telah mengakar di Indonesia tentu merupakan bukti bahwa negara ini masih belum berdaulat secara politik. Sistem akuntansi di Indonesia belum dapat dikatakan berdaulat karena masih berbasis kepada ideologi kapitalisme yang notabene bertentangan dengan jati diri negara ini. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa PAT yang berpusat kepada keuntungan materi sebagai tujuan, pada akhirnya akan menciptakan ruang kekuasaan semu pada struktur sosial masyarakat (Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016). Bahkan, terdapat sebuah tulisan yang menyatakan bahwa pengadopsian IFRS di Indonesia merupakan bentuk hegemoni dalam bidang ekonomi untuk kesejahteraan investor semata (Shonhadji, 2015). Hal ini menjadi pembelajaran bahwa perubahan paradigma dan praktik akuntansi sesuai dengan landasan ideologi Pancasila menunjukkan kedaulatan dalam bidang politik.

Kedua, berdikari dalam bidang ekonomi. Bangsa Indonesia diarahkan untuk memiliki sistem ekonomi yang berciri khas dirinya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Sistem ekonomi tersebut tentunya berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dijalankan dengan semangat kebersamaan. Tujuan dari sistem ekonomi tersebut adalah mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh kalangan masyarakat (Parikesit, 2012b). Kesejahteraan tersebut kemudian mengarah kepada Tuhan sebagai pusat dari sistem ekonomi dan kehidupan manusia (Triyuwono, 2011). Hal ini tentu berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang menjadi landasan PAT yang hanya bertujuan kepada kesejahteraan individu semata.

Asumsi manusia sebagai *homo economicus* dalam PAT yang berasal dari negara kapitalis tentu dengan sendirinya menunjukkan bahwa Indonesia tidak mandiri dalam bidang ekonomi. Sebuah negara masih belum bisa dikatakan berdikari jika masih mengikuti sistem ekonomi yang tidak berciri khas dirinya sendiri dan hal ini terjadi pada Indonesia. Selain itu, terjadinya jurang kemiskinan

sejatinya disebabkan oleh ketidakberdayaan negara dalam membangun sistem ekonomi yang berciri khas dirinya (Parikesit, 2012b). Ketika kita menyadari bahwa berdikari ekonomi merupakan amanah Pancasila, seharusnya perubahan terhadap asumsi manusia harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Ketiga, berkepribadian dalam bidang sosial budaya. Masyarakat Indonesia harus memiliki struktur sosial sosial budaya sendiri tanpa adanya intervensi dari negara lain. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa jati diri bangsa dapat dikatakan berdaulat apabila memiliki kepribadian sendiri berdasarkan pada kearifan lokal (*local wisdom*) (Latif, 2015). Kedaulatan sosial seperti ini juga tercermin apabila pengembangan akuntansi juga didasarkan pada kearifan lokal masyarakat. Sifat inilah yang sejatinya sudah terdapat pada pemikiran akuntansi “kaum pinggiran¹⁹” masyarakat Indonesia (Triyuwono, 2011; Wiyarni *et al.*, 2014; Sitorus, 2016a). Sayangnya, landasan seperti ini belum terimplementasi dalam *conceptual framework* akuntansi Indonesia yang notabene masih berbasis kepada PAT dan laba.

Keberlangsungan PAT dan laba yang notabene membawa pertentangan asumsi budaya dengan ideologi Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki kepribadian secara sosial budaya. Selama ini struktur sosial budaya masyarakat bangsa Indonesia masih terpengaruh oleh kebijakan internasional melalui hegemoni PAT dan laba. Bahkan, pengadopsian asumsi *homo economicus* sebagai dampak adopsi PAT sejatinya menunjukkan ketertundukan bangsa Indonesia kepada kalangan tertentu dalam aspek sosial budaya karena hal ini bertentangan dengan pemikiran ideologi Pancasila. Oleh karena itu,

¹⁹ “Kaum pinggiran” oleh Triyuwono (2011) didefinisikan sebagai pihak-pihak yang selama ini termarginalkan dalam pengembangan paradigma akuntansi modern.

perubahan asumsi manusia dari *homo economicus* menjadi *homo pancasilaus* pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan aspek sosial budaya yang berdaulat.

Ketiga amanah tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan keutuhan manusia dalam paradigma kehidupan. Manusia yang utuh tidak lagi memandang unsur materi dan kepentingan dirinya dalam membangun paradigma kehidupan. Seluruh unsur yang ada dalam diri AKU manusia melebur dalam semangat kebersamaan dengan Tuhan sebagai pusat (Soekarno, 1964). Dengan demikian, semangat Trisakti mengubah AKU menjadi KITA untuk mewujudkan keutuhan tersebut.

Pada sudut pandang lainnya, amanah Trisakti membawa manusia kepada kesadaran terhadap realitas fisik, batin, dan spiritual. Realitas fisik Trisakti terwujud dalam konsep kesejahteraan bersama dan berdaulat masyarakat. Realitas batin terwujud dalam semangat kebersamaan dan kesadaran untuk saling membangun peradaban bangsa. Sementara itu, realitas spiritual terwujud ketika kedua hal tersebut dipusatkan kepada Tuhan sebagai puncak kehidupan. Inilah bentuk keterpaduan antara dimensi sosialisme (masyarakat) dan ketuhanan dalam wujud amanah.

Bukan hanya manusia, akuntansi juga harus mengarahkan dirinya ke dalam ketiga realitas tersebut sebagai bentuk akuntabilitas terhadap amanah Trisakti. Akuntansi tidak hanya berperan sebagai pengambilan keputusan semata, tetapi juga harus menjadi sarana bagi manusia untuk melakukan amanahnya (Triuwono, 2012). Selain itu, akuntansi sejatinya turut pula menjadi proses pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan melalui aktivitas keuangan (Sitorus, 2015), sehingga konsep kedaulatan amanah harus ada dalam bidang ini. Sifat demikian tentu menuntut akuntansi untuk menghilangkan *self interest* dan merombak konsep keuntungan yang selama ini memancing manusia dalam dunia nafsu.

Amanah Trisakti baru dapat tercapai ketika masyarakat memiliki kesadaran terhadap sistem yang mandiri dan berdaulat. Amanah Trisakti tidak dapat terwujud saat terdapat sekat-sekat sosial yang menghalangi persatuan dalam masyarakat. Selain itu, amanah Trisakti malah menjadi pengganjal ketika masih ada manusia yang memiliki pola pikir AKU dalam kehidupannya. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalankan amanah Trisakti dengan ketulusan dari dalam hatinya untuk mewujudkan kedaulatan seutuhnya. Inilah yang disebut gotong royong, keadaan di mana masyarakat memiliki kesadaran untuk saling bersama-sama membangun bangsa secara berdaulat.

Apakah amanah ini merupakan beban bagi manusia? Manusia selayaknya bersyukur dapat mengemban amanah dalam kehidupannya. Amanah sejatinya merupakan bentuk kepercayaan dari Tuhan kepada manusia sebagai ciptaannya yang paling mulia. Selain itu, tujuan dari amanah Trisakti yang mewujudkan keutuhan manusia sejatinya merupakan berkah tak ternilai (*avant grade*) dan bukannya beban. Berkah inilah yang tidak dapat dipandang dalam asumsi *homo economicus* (Sitorus, 2016a).

Konteks demikian juga harus terwujud dalam pengembangan keilmuan dan praktik paradigma akuntansi. Selama ini akuntansi modern yang terefleksi dalam PAT menganggap amanah sebagai beban ataupun biaya karena terdapat kemungkinan entitas yang mengeluarkan materi untuk berkontribusi (Suwardjono, 2013). Hal ini kemudian menimbulkan konsekuensi bahwa kontribusi entitas untuk menjalankan amanah tidak boleh melebihi total pendapatan yang diraih (Parikesit, 2012b). Oleh karena itu, akuntansi harus mengonstruksi kebermanfaatan nonmateri untuk mewujudkan amanah yang seutuhnya.

3.4 Nilai Persatuan: Hakikat Manusia yang Manunggal

Kemanunggalan merupakan sesuatu yang muncul ketika manusia menyadari perannya dalam menjalankan amanah (Triyuwono, 2012). Seperti yang

telah dijelaskan sebelumnya, manusia tidak dapat melakukan atau bahkan menyadari amanah saat menganggap keberadaan dirinya sebagai unsur terpenting dalam kehidupan. Tuhan memberikan amanah kepada manusia untuk dijalankan secara bersama-sama, bukan oleh satu individu semata. Implikasinya, amanah baru dapat dijalankan ketika segala unsur kehidupan menyatu kepada Tuhan sebagai pusatnya. Oleh karena itu, manusia harus menyatu dengan segala realitas kehidupan untuk menjalankan amanah tersebut.

Kemanunggalan tidak terjadi selama manusia masih mengutamakan materi dan nafsu pribadi sebagai landasan kehidupannya. Sikap manusia yang hanya memprioritaskan materi dan kepentingan dirinya tentu menjadikannya lupa terhadap keberadaan realitas lain dalam kehidupan. Bahkan, hal ini turut mereduksi kedaulatan manusia secara utuh. Hal inilah yang terjadi pada asumsi manusia sebagai *homo economicus*.

Pada akhirnya, kita perlu menyadari bahwa sifat egois dalam *homo economicus* menimbulkan jarak antara diri manusia dan unsur lain dalam kehidupan. PAT, melalui asumsi manusia sebagai *homo economicus*, secara tegas mengarahkan manusia (dan akuntansi) dalam jeratan materi belaka dalam paradigma kehidupan. Arah seperti ini tentu hanya membuat realitas yang lain tidak ubahnya seperti investasi ataupun beban demi meraih materi dalam aktivitas perekonomian (Friedman, 1995; Malsch dan Guénin-Paracini, 2013). Bahkan, kita tidak perlu merasa heran apabila banyak manusia yang menghalalkan segala untuk meraih materi tanpa memedulikan keberadaan Tuhan atau sesamanya (Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016). Implikasinya, pembebasan terhadap asumsi manusia sebagai *homo economicus* juga ditujukan demi menyatukan manusia dengan segala unsur realitas kehidupan.

Manusia, ketika berperan sebagai *homo pancasilaus*, harus menanggalkan egonya untuk menjadi manunggal. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, manusia

yang memiliki kesadaran Pancasila sebagai paradigma hidup dituntut untuk menanggalkan *self interest* demi membangun peradaban bersama. Hal ini kemudian menimbulkan tuntutan bagi manusia untuk bersama-sama saling membangun dengan menanggalkan materi sebagai tujuan akhir kehidupan (Mulawarman, 2013b; Latif, 2015; Sitorus, 2015). Semangat kebersamaan ini kemudian membentuk sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur manusia, tidak seperti status quo yang berpatokan kepada ego (Cahyanto dan Parikesit, 2011; Molisa, 2011). Soekarno (1960) selaku *founding father* Pancasila bahkan meletakkan hal ini bukan hanya sebagai tujuan masyarakat Indonesia semata, melainkan juga bagi kebangkitan peradaban seluruh umat di dunia.

Terdapat tiga aspek hubungan yang harus disatukan untuk mewujudkan manusia yang manunggal. *Pertama*, manusia harus menyatukan dirinya dengan Tuhan. Hal ini merupakan konsekuensi dari kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Kaelan, 2010). Manusia harus menyadari bahwa dirinya merupakan ciptaan Tuhan, sehingga dirinya tidak dapat melepaskan hubungan dari-Nya. Sifat ini kemudian membawa manusia kepada hubungan yang saling melekat antara dirinya dan Tuhan, baik pada saat menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat (Triyuwono, 2012; Sitorus, 2015). Dengan demikian, kesatuan hubungan antara manusia dan Tuhan merupakan landasan utama dalam membangun paradigma kehidupan.

Kita patut menyadari bahwa keterpisahan hubungan antara manusia dan Tuhan adalah awal dari adanya sifat egois. Sifat egois membuat manusia merasa benar terhadap kepentingannya sendiri dan melupakan esensi terhadap ketergantungannya kepada Tuhan. Hal ini semakin diperparah ketika materi dijadikan tujuan akhir kehidupan karena sejatinya hubungan Tuhan dan manusia tidak berujung kepada realitas tersebut. Implikasinya, kedudukan Tuhan sebagai puncak tertinggi dalam kehidupan manusia tergusur oleh sifat egois. Oleh karena

itu, manusia harus membuang sifat egonya supaya dapat menyatukan hubungan dirinya dan Tuhan.

Kedua, manusia harus menyatukan dirinya dengan sesamanya dalam membangun paradigma kehidupan. Manusia dikatakan menyatu dengan sesamanya apabila mampu menanggalkan sifat egonya dan berjalan seirama antara satu sama lain. Sebaliknya, manusia tidak dapat dikatakan menyatu dengan sesamanya apabila masih mempertahankan ego pribadi sebagai landasan kehidupan. Hal ini merupakan tantangan bagi manusia, terutama dalam konteks mempertahankan eksistensi masyarakat dan keutuhan negara. Sebuah negara dapat dikatakan jatuh²⁰ karena masing-masing golongan masyarakat tidak memiliki hubungan yang seirama dan mengutamakan egonya (Soekarno, 1960).

Diri (*self*) manusia kemudian melebur dengan sesamanya ketika terjadi kesatuan tersebut. Hal ini diawali oleh kesadaran bahwa manusia sejatinya adalah makhluk sosial, sehingga penyatuan diri diperlukan untuk membangun kehidupan yang seirama. Peleburan ini berpusat kepada roh sebagai unsur realitas terdalam (titik sentral) pada diri manusia. Soekarno (1945) menyebut konsep ini sebagai perikemanusiaan, keadaan manusia yang tidak menonjolkan kesombongannya. Dengan demikian, peleburan dalam diri manusia sama sekali tidak memperhitungkan keuntungan pribadi sebagai indikator keberhasilan aktivitas perekonomian.

Aspek ini juga sekaligus menjadi antitesis teori agensi yang membawa manusia dan akuntansi modern (PAT) dalam dunia persaingan. Jika teori agensi memandang bahwa manusia merupakan pribadi yang saling bersaing, hal

²⁰ Kejatuhan dalam perspektif ini tidak hanya diartikan dalam aspek politik semata. Aspek ekonomi juga dapat menyebabkan kejatuhan negara. Kesenjangan ekonomi pada akhirnya menyebabkan jarak sosial dan berujung kepada rusaknya struktur masyarakat (Sitorus, 2016a; Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016). Hal ini juga diungkapkan oleh Amir dan Derifatoni (2013) yang dalam tulisannya menemukan diskriminasi terhadap kaum pinggiran melalui konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial.

sebaliknya justru terjadi pada konsep kemanunggalan ini. Manusia sejatinya harus saling membangun demi kemaslahatan aktivitas perekonomian (termasuk akuntansi) bagi Tuhan, sesama, dan alam semesta (Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016). Persaingan pada akhirnya membawa kesenjangan sosial di mana hanya segelintir kalangan yang menikmati keuntungan atas aktivitas perekonomian dan sosial kemasyarakatan. Pada akhirnya, persaingan menghambat manusia untuk menyatu dengan sesamanya, baik dalam aktivitas perekonomian maupun aspek kehidupan lainnya.

Dalam perspektif lainnya, kemanunggalan manusia dengan sesamanya juga menghindarkan diri dari tindakan tidak etis. Manusia tidak mungkin melakukan hal yang merugikan sesamanya ketika memiliki kemanunggalan satu sama lain. Hal ini justru berkebalikan dengan teori agensi yang malah membawa legitimasi bagi terjadinya tindakan tidak etis dalam aktivitas perekonomian (Smith, 2011; Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016). Kita harus mengakui bahwa pada akhirnya teori agensi membawa roh ketidaketisan, terutama ketika hal ini dikaitkan dalam sudut pandang Pancasila (Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016). Oleh karena itu, kita perlu heran ketika menjumpai banyak manusia tidak etis karena *grand theory* mengatakan demikian (Smith, 2011; Kumalasari dan Sudarma, 2013).

Ketiga, manusia harus menyatukan dirinya dengan alam semesta dalam membangun paradigma kehidupan. Manusia sejatinya melihat bahwa alam semesta merupakan bagian dari kehidupannya. Hal ini dilandasi fakta bahwa alam semesta juga merupakan ciptaan Tuhan sehingga manusia tidak boleh memarginalkan keberadaan unsur ini dalam paradigma kehidupan. Pendapat ini memang jauh berbeda dengan konsep PAT yang memandang bahwa fokus dari alam semesta adalah *tool* bagi manusia untuk meraih laba (Ahmar dan Kamayanti, 2011) sehingga eksploitasi terhadap unsur ini merupakan hal yang tidak dapat

dihindari. Oleh karena itu, kesatuan antara manusia dan alam semesta merupakan upaya untuk mengangkat derajat unsur ini dalam paradigma kehidupan, khususnya aktivitas ekonomi dan akuntansi.

Kemanunggalan terhadap alam semesta kemudian berimplikasi terhadap sikap manusia yang menghormati unsur ini seperti dirinya sendiri. Manusia akan berpikir sekian kali untuk mengeksploitasi alam semesta secara sembarangan karena hal tersebut sama artinya dengan menyakiti diri sendiri. Hal ini akan membentuk kesadaran untuk menjaga dan merawat keutuhan alam semesta demi peradaban yang utuh. Kesadaran ini memberikan pandangan bahwa eksistensi alam semesta jauh lebih penting daripada keuntungan aktivitas perekonomian dalam perspektif PAT (Arena, 2007; Sitorus, 2016a). Dengan demikian, pada masa mendatang manusia (dan entitas) tidak lagi melakukan eksploitasi terhadap alam semesta demi mengejar keuntungan materi (Parikesit, 2012b).

Ketiga kesatuan tersebut kemudian membentuk manusia sebagai pribadi yang utuh dalam menjalani hidup. Keutuhan ini kemudian membentuk hakikat manusia sebagai pribadi monopluralis (Bakry, 2010). Manusia dalam perspektif ini mampu mengombinasikan seluruh jiwa dan raga yang dimilikinya demi ketertundukan kepada Tuhan serta keberkahan bagi sesama dan alam semesta (Bakry, 2010; Swasono, 2014; Sitorus, 2015). Bahkan, mereka selalu berusaha untuk menyeimbangkan dimensi vertikal dan horizontal melalui hikmat dan kebijaksanaan yang dimilikinya (Cahyanto dan Parikesit, 2011; Parikesit, 2012a). Hal inilah yang membuat asumsi manusia dalam perspektif Pancasila selalu mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemaslahatan bersama.

Kemanunggalan bukan hanya terjadi pada aspek manusia semata, melainkan juga tercermin dalam akuntansi. Akuntansi yang hanya membawa realitas fisik semata pada akhirnya mengarahkan manusia dalam dunia fana (Sitorus, 2015). Kemanunggalan dalam akuntansi sangat diperlukan karena pada

dasarnya terdapat hubungan saling memengaruhi antara manusia dan unsur ini. Akuntansi memengaruhi manusia dan sebaliknya, sehingga keduanya harus memiliki sifat kemanunggalan (Triyuwono, 2012; Harahap, 2013; Sitorus, 2015). Oleh karena itu, akuntansi dapat menjadi sarana bagi manusia untuk mempertanggungjawabkan aspek kehidupannya dengan berlandaskan semangat kemanunggalan.

Ketiga aspek kemanunggalan tersebut tercermin dalam konsep desa sebagai jati diri bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia memandang desa bukan sebagai wilayah semata, melainkan juga sarana menjalin persaudaraan (Nadjib, 2013). Gotong royong merupakan landasan mereka dalam membangun sistem kehidupan bersama (Parikesit, 2012b), sehingga tidak ada persaingan untuk menjadi lebih unggul. Nadjib (2013) bahkan menyebutkan bahwa kebersamaan masyarakat desa merupakan kunci utama bertahannya eksistensi negara Indonesia dalam era modern. Semangat kebersamaan inilah yang mereka gunakan untuk membangun sistem perekonomian yang utuh (Cahyanto, 2012).

Masyarakat dalam lingkungan desa memiliki kebahagiaan tersendiri meskipun secara ekonomi ataupun sosial mereka jauh tertinggal dengan kondisi perkotaan. Kita tahu bahwa secara ekonomi dan infrastruktur masyarakat desa jauh tertinggal dengan masyarakat kota. Meskipun demikian, mereka tidak memandang hal tersebut sebagai masalah besar dalam kehidupan. Bagi masyarakat desa, kehidupan sesungguhnya adalah ketika masing-masing pihak saling membangun kesejahteraan bersama dengan penuh kesadaran (Nadjib, 2013). Kesejahteraan tidak hanya diukur dari perolehan materi semata, tetapi juga keberkahan atas hasil usaha bagi Tuhan, manusia, dan alam semesta (Parikesit, 2012b).

Konsep desa sebagai jati diri masyarakat Indonesia kemudian berimplikasi terhadap munculnya *local wisdom* yang berketuhanan dan berperikemanusiaan.

Local wisdom seperti ini juga berimplikasi kepada konsep akuntansi yang dianut oleh masyarakat desa. Sejumlah penelitian mengenai akuntansi masyarakat desa menunjukkan bahwa terjadi keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta dalam aktivitas perekonomian (Rizaldy, 2012; Budiasih, 2014; Wiyarni *et al.*, 2014). Meskipun demikian, hal ini dapat semakin membumi ketika akuntansi tidak lagi berpatokan kepada satu standar tunggal semata (PAT), tetapi memberikan ruang terhadap keberadaan lokalitas masyarakat Indonesia.

Saya menyadari bahwa konsep desa sebagai jati diri bangsa Indonesia tergerus secara perlahan dengan adanya modernitas yang berlebihan, baik dalam aspek manusia maupun akuntansi. Modernitas dapat menjadi pengubah perilaku manusia dan akuntansi menjadi individualistik (Nadjib, 2013; Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016). Meskipun demikian, hal ini jangan sampai membuat larut dalam hegemoni modernitas semata. Sebaliknya, kita harus memiliki keyakinan dan kesadaran bahwa kemandirian mampu menjadi alat untuk mempertahankan jati diri Indonesia dalam bentuk desa.

3.5 Nilai Persatuan dan Kerakyatan: Manusia yang Mencintai Negeranya

Hal terpenting dari asumsi manusia sebagai *homo Pancasila* adalah mencintai negara sebagai bagian terpenting dalam kehidupan. Istilah ini disebut dengan nasionalisme. Kecintaan kepada negara menjadi bagian tak terpisahkan ketika Pancasila dijadikan sebagai *kredo* bagi masyarakat Indonesia dalam berpijak. Pancasila sejatinya merupakan landasan yang terbentuk dari hasil pemikiran masyarakat Indonesia sebagai bangsa dengan kesamaan visi, bukan segelintir pihak semata. Rasa cinta kepada negara sangat diperlukan supaya Pancasila dapat tertanam (*embedded*) secara utuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebaliknya, Pancasila hanya menjadi slogan ataupun candu ketika tidak diimbangi dengan rasa cinta kepada negara.

Rasa nasionalisme yang menjadi cita-cita rakyat Indonesia adalah langkah awal untuk mencapai kesejahteraan bersama. Rasa kecintaan kepada negara mampu menggerakkan rakyat untuk bersama-sama membangun sistem ekonomi yang berbasis kesejahteraan bagi seluruh pihak. Kesejahteraan seperti ini pada akhirnya menciptakan kemerdekaan bagi bangsa dalam segala aspek kehidupan (Cahyanto dan Parikesit, 2011).

Rasa nasionalisme pada dasarnya merupakan roh dalam amanah *homo pancasilaus*. Penjelasan sebelumnya telah menyatakan bahwa *homo pancasilaus* memiliki tiga amanah dasar dalam kehidupan. Amanah tersebut sejatinya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun demikian, amanah tersebut tidak dapat terwujud ketika manusia Indonesia tidak mencintai negaranya sendiri.

Pada sisi lainnya, manusia juga dapat dikatakan manunggal ketika memiliki rasa kecintaan kepada negaranya. Kita perlu mengetahui bahwa hakikat dari negara tidak hanya terbatas pada unsur manusia semata, tetapi juga alam semesta. Alam semesta merupakan bagian dari kedaulatan negara karena unsur ini juga turut terlibat dalam kehidupan manusia. Tidak hanya itu, bangsa Indonesia memiliki pengakuan bahwa Tuhan adalah bagian terpenting dari negara melalui keberadaan sila pertama Pancasila (Nadjib, 2013). Dengan demikian, saya dapat menyimpulkan bahwa ketiga unsur kemanunggalan kehidupan sejatinya terwujud dalam bentuk negara. Oleh karena itu, rasa nasionalisme pada hakikatnya merupakan sikap kesadaran untuk melebur dengan segala unsur kehidupan.

Pada sisi lainnya, rasa mencintai negara juga berarti tidak menjadikan materi sebagai landasan kehidupan manusia. Kita perlu menyadari bahwa materi hanya ditujukan bagi kepentingan segelintir pihak semata (Parikesit, 2012b). Hal ini tentu bertentangan dengan jati diri negara yang tidak hanya terdiri dari segelintir pihak, tetapi mencakup seluruh kalangan. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai

negara jika masih berpatokan kepada materi dalam paradigma kehidupan? Oleh karena itu, seorang *homo pancasilaus* berani menanggalkan materi sebagai tujuan kehidupannya.

Konsep seperti ini diadopsi beberapa pihak dalam melakukan pergerakan ekonomi Indonesia. HOS Tjokroaminoto, sebagai salah satu guru bangsa Indonesia, menggagas perkumpulan Sarekat Islam (SI) demi kesejahteraan rakyat tertindas, baik secara ekonomi maupun politik dan sosial-budaya (Mulawarman, 2015). Bukan hanya itu, Hatta (1987) meletakkan roh nasionalisme Indonesia dalam filosofi koperasi sebagai badan usaha berbasis kerakyatan. Kemudian, Cahyanto (2012) meletakkan filosofi gotong royong sebagai landasan dalam membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha bersama. Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa landasan ekonomi berbasis nasionalisme berarti tidak menjadikan materi sebagai landasan utama.

Konsep seperti ini tentunya juga harus tercermin dalam akuntansi yang bernapaskan semangat nasionalisme. Seperti pembahasan sebelumnya, akuntansi dan manusia memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Akuntansi juga harus memiliki roh nasionalisme untuk menciptakan manusia yang mencintai negara. Akuntansi bukan hanya sekadar angka semata, melainkan juga memuat sistem nilai masyarakat (Oehr dan Zimmermann, 2012) sehingga keberadaan roh nasionalisme ditujukan untuk hal demikian. Oleh karena itu, saya melihat hal yang aneh apabila akuntansi hanya memuat nilai-nilai universal (terstandardisasi) dan mengabaikan keberadaan jati diri bangsa sebagai keyakinan rakyat.

Akuntansi yang menjunjung tinggi *local wisdom* pada dasarnya merupakan bukti perwujudan nasionalisme dalam diri manusia. *Local wisdom* pada dasarnya merupakan jati diri negara dalam membangun peradaban. Sebuah negara akan terombang-ambing pada negara luar dalam membangun peradaban ketika tidak memiliki (atau malah mengabaikan) *local wisdom*. Sebaliknya, sebuah negara

akan memiliki patokan yang jelas dalam mengembangkan paradigma kehidupan (khususnya aspek akuntansi) ketika memiliki *local wisdom* sebagai patokan (Efferin, 2015). Selain itu, *local wisdom* mampu memberikan patokan dalam mengkritisi situasi global, seperti PAT (Efferin, 2015; Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016).

Penelusuran yang dilakukan oleh Bararoh (2013) setidaknya menggambarkan betapa pentingnya roh nasionalisme berbasis *local wisdom* dalam membangun negara yang berdaulat. Beliau menunjukkan bahwa akuntansi (dalam hal ini tercermin pada pengelolaan keuangan daerah) dapat diarahkan untuk membela *wong cilik* dan mewujudkan kemandirian (kedaulatan) negara jika bernapaskan nasionalisme berbasis *local wisdom*. Meskipun demikian, beliau melihat bahwa terjadi peminggiran terhadap nilai-nilai nasionalisme akuntansi karena adanya modernitas. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap perubahan struktur kehidupan masyarakat yang semakin individualistik dan menegasikan keberadaan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa mengkritisi apakah keberadaan *local wisdom* layak untuk dipinggirkan atau justru PAT dan laba (sebagai representasi modernitas) justru menjadi penghalang bagi terwujudnya negara yang berdaulat.

Modernitas manusia dan akuntansi hanya akan membawa keuntungan materi bagi segelintir kalangan semata (Sitorus, 2016a). Selain itu, modernitas juga berkontribusi terhadap hak rakyat yang dirampas oleh kaum utilitarian (Triyuwono, 2006). Oleh karena itu, saya tidak merasa heran apabila Mulawarman (2012) secara tegas mengatakan "*Go to hell with your IFRS!*" untuk menunjukkan kegeramannya atas bentuk manusia dan akuntansi yang tersebut.

Adapun aspek modernitas dalam manusia dan akuntansi pada dasarnya merupakan *local wisdom* dari negara barat. Negara barat sejatinya membawa roh modernitas melalui asumsi manusia, baik sebagai *homo economicus* maupun PAT

(Chiapello, 2007; Brown, Dillard dan Hopper, 2015). Aspek tersebut kemudian dijadikan sebagai kebenaran mutlak karena adanya kekuatan politik dan sosial dari negara tersebut (Ferguson *et al.*, 2009; Stringfellow, McMeeking dan Maclean, 2015). Selain itu, masyarakat dibuat menjadi *yes man* karena negara tersebut juga melakukan tekanan terhadap penguasa, mulai dari tingkat praktik hingga akademisi sekalipun (Brown dan Dillard, 2015; Kusdewanti *et al.*, 2014; Tinker, 2014; Chiapello, 2007). Inilah sebenarnya bentuk penjajahan di era modern, di mana hal tersebut dilakukan tanpa peperangan fisik dan perebutan wilayah, tetapi memanfaatkan situasi ekonomi-sosial masyarakat.

Kita perlu menyadari bahwa penjajahan negara dapat terjadi ketika manusia tidak memiliki roh nasionalisme dalam dirinya. Penjajahan tidak perlu dilakukan dengan melakukan perebutan wilayah kekuasaan secara politik. Sebaliknya, penjajahan hanya perlu dilakukan dengan mematikan roh nasionalisme pada rakyat melalui modernitas dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dilakukan oleh negara-negara maju dengan memanfaatkan arus globalisasi dan menciptakan ketergantungan terhadap kebijakan mereka. Salah satu aspek yang disasar dari kebijakan tersebut adalah memasifkan PAT dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Tinker, Merino dan Neimark, 1982). Oleh karena itu, kita dapat dikatakan terjajah ketika menganggap PAT (bahkan asumsi *homo economicus*) sebagai kebenaran mutlak.

Kita juga perlu menyadari bahwa PAT telah merusak roh nasionalisme pada masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, PAT telah membentuk legitimasi kuat terhadap materi dan *self interest* dalam aktivitas perekonomian (Oakes dan Berry, 2009; Kamayanti *et al.*, 2011). Akibatnya, amanah untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat tidak terwujud karena ketergantungan terhadap PAT beserta lembaga yang menaunginya (Sitorus *et al.*, 2016; Oakes dan Berry, 2009).

Oleh karena itu, kita perlu menciptakan manusia (dan akuntansi) yang berciri khas Indonesia untuk mewujudkan amanah sebagai bangsa yang berdaulat.

Kemudian, bagaimana menciptakan manusia (dan akuntansi) yang berciri khas Indonesia? Pergerakan dari seluruh kalangan merupakan langkah utama menciptakan manusia (dan akuntansi) nasionalis. Seluruh kalangan (bukan hanya segelintir) seharusnya memiliki kesadaran untuk membangun manusia dan akuntansi yang memiliki roh nasionalisme. Seperti halnya prinsip kemanunggalan manusia dengan sesamanya, pergerakan hanya akan menjadi retorika ketika tidak terdapat kesadaran dari masing-masing pihak untuk bergerak. Sebaliknya, akuntansi tidak akan memiliki roh nasionalisme ketika keberadaannya hanya digunakan sebagai aktivitas bisnis semata (Cahyanto, 2012).

Di Indonesia, pergerakan tersebut telah diinisiasi oleh Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia (MAMI) yang mengumpulkan berbagai pemikiran mengenai manusia (dan akuntansi) yang berciri khas *local wisdom*. MAMI merupakan organisasi para cendekiawan akuntansi yang berfokus pada pengembangan akuntansi yang berasaskan *local wisdom*. Para cendekiawan yang tergabung dalam MAMI mengembangkan akuntansi dengan berasaskan *local wisdom* karena terdapat kesadaran bahwa penjajahan yang begitu kuat sehingga mengungkung roh nasionalisme, baik pada level manusia maupun sistem ekonomi-politik-sosial (Kusdewanti *et al.*, 2014). Oleh karena itu, mereka menyatakan perang terhadap penjajahan tersebut dengan mengembangkan akuntansi berbasis *local wisdom* tanpa memedulikan standar ataupun organisasi penyusunnya (Kusdewanti *et al.*, 2014; Sitorus, 2015).

Saya menyadari bahwa terdapat pertanyaan mengenai bagaimana transaksi keuangan antarnegara ketika manusia dan akuntansi tidak terkonsep dalam PAT. Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh sejumlah kalangan yang mendukung keberadaan *multinational corporation* (MNC). Mereka menginginkan

manusia dan akuntansi berbasis PAT untuk memudahkan pengambilan keputusan bisnis (Tinker, Merino dan Neimark, 1982; Irianto, 2010). Meskipun demikian, hal ini sejatinya merupakan kesalahan karena mengurangi kedaulatan negara, baik dalam aspek manusia maupun akuntansi. Sebaliknya, mereka justru sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan keberadaan manusia maupun akuntansi. Seorang tamu memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan aturan tuan rumah. Dengan demikian, hal ini juga selayaknya berlaku bagi mereka.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sejatinya akuntansi, termasuk jati diri manusia, tidak bisa diganggu oleh kepentingan bisnis. Keberadaan akuntansi yang terlegitimasi secara mutlak dan universal hanya akan mereduksi kedaulatan manusia maupun negara (termasuk akuntansi) dalam aktivitas perekonomian. Pergerakan yang dilakukan oleh cendekiawan MAMI dapat dikatakan sebagai contoh perlawanan terhadap kepentingan bisnis modern yang sejatinya merusak kehidupan manusia. Oleh karena itu, pergerakan ini harus mendapat dukungan dari semua pihak tanpa terkecuali meskipun saya menyadari bahwa masih terdapat kalangan yang mengkafirkan hal ini.

Saya percaya bahwa pergerakan ini, jika dilakukan secara konsisten, secara perlahan akan membentuk pribadi *homo pancasilaus*. Saya merasa bahwa terjadi internalisasi roh nasionalisme dalam diri manusia (dan akuntansi) Indonesia ketika pergerakan perlawanan dilakukan secara konsisten. Jika Tjokroaminoto ataupun Perhimpunan Indonesia menggerakkan masa untuk mencapai kemerdekaan, hal tersebut harus juga terjadi pada manusia (akuntansi) pada era globalisasi. *Homo pancasilaus* harus segera dibentuk walaupun harus dengan perlawanan sekalipun.

3.6 Homo Pancasila: Manusia Berkeadilan

Seluruh konsep dari *homo pancasilaus* diwujudkan dalam pribadi manusia yang berkeadilan. Inilah sejatinya aksiologi dari asumsi manusia sebagai *homo pancasilaus*. Aksiologi ini tidak berlaku hanya sebagai retorika, tetapi terinternalisasi (*embedded*) dalam setiap aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan akuntansi. Lalu, bagaimana manusia berkeadilan dalam pandangan Pancasila? Bagaimana keadilan dalam pandangan Pancasila dapat terinternalisasi pada kehidupan manusia? Penjelasan berikut ini menguraikan manusia berkeadilan berdasarkan pandangan Pancasila beserta cara untuk menginternalisasikannya.

Sebelumnya, kita perlu menyadari bahwa setiap asumsi manusia pada hakikatnya memiliki konsep keadilan tersendiri. Hal yang menjadi pembeda adalah landasan dan tujuan dari keadilan tersebut. Salah satu contohnya adalah perspektif keadilan distributif yang notabene merupakan perwujudan *homo economicus*. Dalam perspektif ini, sesuatu hal dapat dikatakan adil apabila berdasarkan kepada hal-hal rasional dan bermoral (Rawls, 1999; Boot, 2012). Implikasinya, manusia mendekati diri kepada hal-hal rasional (termasuk materi sebagai tujuan aktivitas perekonomian dan akuntansi) dan menegaskan keberadaan Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran apabila menjumpai banyak manusia (dan akuntansi) kapitalis karena perspektif keadilan yang terbentuk melegitimasi hal tersebut (McKernan dan MacLulich, 2004).

Hal yang berbeda terjadi apabila kita mendefinisikan manusia berkeadilan dalam sudut pandang Pancasila. Manusia berkeadilan dalam sudut pandang Pancasila dapat diartikan sebagai pribadi yang menjunjung tinggi keseimbangan dalam kehidupan (Sitorus, 2015). Kesimbangan dalam pandangan Pancasila tidak selalu dihubungkan dengan perolehan materi (Cahyanto dan Parikesit, 2011; Sitorus, 2015), tetapi terdapat unsur lain yang keberadaannya jauh lebih penting

bagi kehidupan manusia. Unsur tersebut tentunya harus berpusat kepada Tuhan sebagai pusat kehidupan (Parikesit, 2012b; Sitorus, 2015). Hal inilah yang menjadikan Pancasila bersifat *au contraire* jika dibandingkan dengan keadilan distributif.

Jika kita mendalami filosofi keadilan Pancasila, terdapat tiga kata kunci utama untuk menyeimbangkan hal tersebut. *Pertama*, keadilan terhadap Tuhan, manusia, dan alam semesta. Manusia harus menyatukan dirinya dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta untuk dapat dikatakan adil. Amanah Pancasila sila pertama (keadilan bagi Tuhan dan alam semesta) dan kedua (keadilan bagi manusia) sejatinya secara tegas menyatakan keadilan terhadap ketiga unsur tersebut. Selain itu, unsur ini sudah merupakan “harga mati” karena pada hakikatnya Pancasila menyatukan manusia dengan ketiga unsur tersebut (lihat pembahasan mengenai konsep kemanunggalan).

Jurang keterpisahan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta merupakan bukti bahwa selama ini terdapat ketidakadilan dalam sudut pandang Pancasila. Hal ini terdapat pada modernitas sistem kehidupan manusia. Modernitas, melalui *homo economicus*, telah menciptakan sistem yang berketidakadilan dengan menonjolkan materi sebagai tujuan utama kehidupan (Triuwono, 2012; Mulawarman dan Kamayanti, 2014; Gallhofer et al., 2011).

Kedua, keadilan beradab dalam segala lini kehidupan. Manusia dapat dikatakan adil secara adab ketika mampu menggunakan hikmat dan kebijaksanaannya dalam menjalani kehidupan (Latif, 2012). Sila kedua dan keempat Pancasila (kemanusiaan dan kerakyatan) secara tegas mengamanahkan hal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya pada manusia melainkan juga landasan paradigma (Cahyanto dan Parikesit, 2011). Oleh karena itu, sistem kehidupan (termasuk dalam hal ini akuntansi) harus membantu manusia menjadi adil secara adab. Dalam hal ini, manusia harus kembali lagi pada hakikat

bahwa manusia dan akuntansi memiliki hubungan yang saling memengaruhi, khususnya dalam hal mewujudkan keadilan beradab.

Hal yang tidak boleh dilupakan ketika berbicara mengenai manusia beradab adalah sikap saling peduli dalam menjalankan kehidupan. PAT dan laba notabene berasumsikan manusia sebagai pribadi *homo economicus* yang secara tegas menunjukkan *self interest* dalam pengembangan kehidupan (Jensen dan Meckling, 1994). Manusia jelas tidak memiliki sikap peduli karena *self interest* menonjolkan nafsu untuk semakin berkuasa dalam kehidupan (Waldron, 2010; Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016). Oleh karena itu, kita harus mengubah pola pikir dari *self* menuju kemanunggalan (baik dari segi manusia maupun akuntansi) demi mewujudkan manusia beradab.

Ketiga, keadilan untuk mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat dapat dikatakan madani ketika memiliki kesadaran terhadap tatanan sosial yang padu (Latif, 2014). Selain itu, masyarakat madani memiliki pola pikir saling bekerja sama dalam membangun sistem kehidupan (Cahyanto, 2012; Latif, 2014). Hal ini karena bagi masyarakat madani suatu hal dapat dikatakan adil ketika mampu membawa mereka pada kesejahteraan bersama dan sistem sosial berbasis persaudaraan (Cahyanto dan Parikesit, 2011). Dua kata kunci ini sejatinya menunjukkan bahwa keadilan dalam masyarakat madani tidak dapat diukur dengan menggunakan materi kesuksesan individu semata. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada jarak sosial dalam sistem masyarakat madani, layaknya implementasi *homo economicus*.

Timbulnya jarak dalam sistem sosial masyarakat menjadi bukti bahwa modernitas (melalui PAT dan asumsi manusia sebagai *homo economicus*) tidak mampu membawa keadilan sosial. Kita harus mengakui bahwa asumsi manusia sebagai *homo economicus* telah membawa sifat individualitas yang pada akhirnya menimbulkan keterpisahan ekonomi dan sosial masyarakat (Tinker, Merino dan

Neimark, 1982; Gaffikin, 2009). Sifat ini kemudian menimbulkan langkah diskriminasi dengan menonjolkan pemilik modal dan meniadakan kalangan lainnya (Chiapello, 2007; Schneider, 2012). Bukan hanya itu, asumsi ini telah mengubah perilaku masyarakat dari madani menjadi individualis sehingga terdapat perubahan *mindset* keadilan dari kebersamaan menuju materialis (Nadjib, 2013; McKernan dan MacLulich, 2004). Dengan demikian, perubahan paradigma sistem ekonomi (khususnya ekonomi) sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat madani (Mulawarman, 2013b; Sitorus, 2015).

Inilah ketiga esensi utama dari manusia berkeadilan dalam perspektif Pancasila. Keadilan dalam perspektif ini tidak lagi menekankan materi sebagai tujuan aktivitas ekonomi (dan akuntansi), tetapi mengembalikan manusia sebagai hakikatnya yang *nothing* (lihat penjelasan subbab sebelumnya). Saya menyadari bahwa mewujudkan manusia berkeadilan merupakan sesuatu yang sulit karena manusia harus mengubah pola pikirnya dari *self* menjadi *soul interest* (Kusdewanti, Triuwono dan Djamhuri, 2016). Meskipun demikian, hal ini dapat teratasi ketika segenap komponen bangsa sama-sama bergerak untuk mewujudkan manusia (dan akuntansi) berkeadilan.

Salah satu negara yang tidak menjadikan materi sebagai patokan keadilan adalah Bhutan. Pemimpin negara tersebut menggunakan kebahagiaan berdasarkan nilai spiritualisme Budha sebagai patokan dalam berkeadilan (Parikesit, 2012a). Masyarakat negara tersebut juga menyadari bahwa materi bukanlah sesuatu yang penting dalam kegiatan perekonomian, sehingga tidak layak apabila dijadikan patokan utama berkeadilan (Lamberton, 2015). Memang, negara ini termasuk lambat secara pertumbuhan ekonomi dalam kacamata negara barat (Parikesit, 2012a; Lamberton, 2015). Meskipun demikian, hal ini bukanlah

alasan utama untuk menanggalkan ajaran agama dan berpaling kepada materi sebagai patokan keadilan (Parikesit, 2012a).

Dalam sudut pandang keindonesiaan, keadilan ini tercermin dalam kehidupan “kaum pinggiran” yang notabene tidak dianggap dalam pengembangan akuntansi modern (Triyuwono, 2011; Sitorus, 2016a). Mereka ikhlas menjalankan usahanya sebagai bagian dari pengabdianya kepada Tuhan, manusia, dan alam semesta (Sitorus, 2016a). Mereka juga sadar bahwa terdapat materi yang juga menunjang kehidupan sehari-hari (Triyuwono, 2011). Meskipun demikian, mereka menganggap hal tersebut harus kembali kepada Tuhan sebagai pusat kehidupan. Oleh karena itu, mereka melihat keadilan bukan dalam sudut pandang materi, melainkan kembali kepada hakikat keseimbangan hidup. Keadilan seperti ini yang tidak dapat kita temukan dalam PAT ataupun *homo economicus* (Lamberton, 2015).

Sikap “kaum pinggiran” tersebut sejatinya dapat dijadikan teladan dalam membangun manusia berkeadilan. “Kaum pinggiran” yang sejatinya merupakan representasi dari manusia Indonesia sejatinya tidak boleh terpinggirkan dalam pengembangan akuntansi (dan manusianya). Pancasila mengakui bahwa rakyat merupakan bagian utama dari kehidupan (sila keempat), sehingga sangat tidak mungkin jika hanya pemilik modal yang dijadikan *role mode* bagi pengembangan manusia (dan akuntansi).

3.7 *Homo Pancasila* dalam Problematika PAT dan Laba

Proses ini tidak hanya berhenti kepada pembentukan jati diri manusia sebagai *homo pancasilaus*. Hal ini kemudian berlanjut kepada pembentukan antitesis *homo economicus* sebagai landasan dari PAT dan laba. Dalam perkataan lain, pembentukan jati diri manusia tidak berhenti kepada konteks “siapa” (merujuk kepada hakikat) melainkan berlanjut kepada “bagaimana” (merujuk kepada cara).

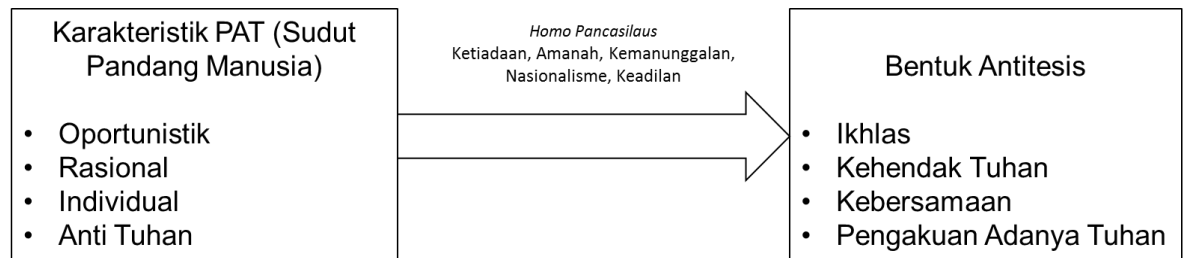
Cara tersebut menghasilkan dampak yang ditimbulkan (beserta langkah yang harus dilalui) dalam antitesis, khususnya Pancasila. Oleh karena itu, proses *homo pancasilaus* menjadi antitesis memiliki hal yang penting untuk ditampilkan dalam pembahasan bab ini.

Pembentukan antitesis terhadap *homo economicus* juga merupakan upaya untuk merumuskan bentuk lain dari PAT dan laba. Pembahasan sebelumnya (Bab I) telah menguraikan empat karakteristik positivisme yang terdapat dalam PAT beserta dengan konsekuensi yang ditimbulkan, khususnya pada aspek manusia. Ketika *homo pancasilaus* hadir sebagai antitesis dari *homo economicus*, muncul pertanyaan mengenai bagaimana langkah untuk mengatasinya²¹. Ketika langkah tersebut tidak dilakukan, perubahan asumsi manusia dari *homo economicus* menuju *homo pancasilaus* tidak terjadi. Dalam perkataan lain, kedua sifat tersebut saling berdiri sendiri dan dampak dari perubahan tersebut (terutama jika dikaitkan kepada PAT dan laba) juga tidak tampak.

Pembentukan antitesis terhadap *homo economicus* juga tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus melalui sebuah proses. Proses tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan penyadaran kepada manusia terhadap urgensi *homo pancasilaus*. Selain itu, proses tersebut juga dilakukan untuk memberikan bentuk antitesis yang dihasilkan dari jati diri manusia sebagai *homo pancasilaus*. Secara ringkas, bentuk antitesis yang dihasilkan dari PAT tercermin dalam Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Proses Antitesis PAT dalam Pandangan *Homo Pancasilaus*

²¹ Pertanyaan ini juga merupakan suatu langkah refleksi mengenai bagaimana karakteristik manusia mengatasi permasalahan dalam ontologi akuntansi. Hal ini dilakukan mengingat ontologi akuntansi terbentuk dari sudut pandang manusia (lihat pengantar Bab 1).



Gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika *homo pancasilaus* dijadikan sebagai landasan bagi manusia, maka tercipta bentuk antitesis yang berbeda. Hal ini terlihat dari hasil antitesis yang justru tidak berpatokan kepada hal-hal bersifat materi. Bahkan, hasil antitesis tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk membangun peradaban yang utuh. Pada titik inilah Pancasila (yang termanifestasi melalui *homo pancasilaus*) tampak sebagai ideologi yang antikompromi.

Pada perspektif lainnya, gambar tersebut juga menunjukkan bahwa antitesis terhadap *homo economicus* tidak bisa hanya dilakukan melalui satu nilai semata. Dalam hal ini, masing-masing hasil antitesis tidak dapat terjadi tanpa menggunakan keempat aspek *homo pancasilaus* sekaligus. Hal ini berasal dari pernyataan bahwa masing-masing karakteristik *homo pancasilaus* tidak berdiri secara parsial. Hal ini disebabkan oleh masing-masing karakteristik *homo pancasilaus* yang terdiri dari lebih dari satu nilai Pancasila. Selain itu, sila-sila yang terdapat dalam jiwa Pancasila sejatinya bukanlah sesuatu yang terpisah sehingga menjadi sesuatu yang wajar apabila hasil antitesis menghasilkan keterkaitan dan tidak berdiri sendiri.

Walaupun gambar tersebut menunjukkan proses penyadaran, tidak menutup kemungkinan perubahan melalui pergerakan sosial dapat terjadi. Sebaliknya, kemungkinan ini terbuka lebar mengingat kelima nilai Pancasila merupakan bentuk revolusi peradaban yang menjadi kesadaran bangsa Indonesia (Soekarno, 1960). Selain itu, pergerakan sosial dalam akuntansi berbasis

Pancasila juga terjadi karena perubahan secara terstruktur (khususnya dalam aspek manusia) dapat terjadi ketika masyarakat menyadari bahwa dirinya terjajah dan bersama-sama bergerak untuk melakukan perubahan secara drastis²²

Kunci utama dari keberhasilan proses ini adalah penyadaran manusia untuk lepas dari karakteristik *homo economicus*. Penyadaran ini merupakan langkah yang sangat penting karena perubahan terhadap konsep manusia dan akuntansi sangat dipengaruhi oleh kesadaran untuk membangun peradaban yang utuh (Bryer, 2014; Triyuwono, 2015b). Semakin manusia menyadari hakikatnya sebagai *homo pancasilaus*, hasil antitesis terhadap problematika PAT juga dapat terlaksana. Penyadaran ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti pendidikan akuntansi (Kamayanti, 2012a), perjalanan proses bisnis (Sitorus, 2016a), ataupun pergerakan sosial dan kemasyarakatan (Brown, Dillard dan Hopper, 2015).

Pada sisi lainnya, proses ini juga memberikan arah bagi laba dalam perspektif Pancasila. Ketika antitesis tersebut memberikan gambaran bahwa manusia tidak memprioritaskan materi, akuntansi juga memiliki arah demikian. Dalam hal ini, laba berbasis Pancasila seharusnya tidak lagi bertumpu kepada bentuk teknis pelaporan dan akuntabilitas.

Hal yang terutama di balik perubahan ini adalah penentuan sejauh mana laba berbasis Pancasila mampu mewujudkan keadilan bagi setiap pihak. Ketika laba berbasis ekonomi hanya memandang keadilan dalam segi materi, hal sebaliknya justru terjadi dalam pandangan *homo pancasilaus*. Laba yang tercipta dalam perspektif Pancasila harus mengakomodasi sejumlah karakteristik *homo pancasilaus*.

²² Penjelasan lebih lanjut mengenai akuntansi dan pergerakan sosial tercantum dalam Bab 6.

Perubahan terhadap jati diri manusia masih belum bisa dikatakan sebagai antitesis yang utuh. Hal ini tampak dari konstruksi manusia yang belum menemukan bentuk konkret dari laba sehingga perlu penjabaran lebih lanjut. Penjabaran yang paling utama adalah sifat dan keberadaan Tuhan dalam akuntansi Pancasila. Penjabaran selanjutnya adalah tujuan dan bentuk alternatif dari laba. Penjabaran-penjabaran tersebut dibahas dalam Bab berikutnya.

3.8 Kesimpulan

Bab ini pada hakikatnya menguraikan sejumlah karakter *homo pancasilaus* sebagai antitesis dari *homo economicus*. *Homo pancasilaus* terbentuk dari lima nilai utama Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Terbentuknya *homo pancasilaus* harus diawali dengan meniadakan diri manusia dan meleburkannya dalam kemanunggalan antara Tuhan, sesama, dan alam semesta. Kemanunggalan tersebut kemudian memberikan amanah yang disebut Trisakti untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat. Akhirnya, *homo pancasilaus* memberi wujud pribadi manusia berkeadilan yang menyeimbangkan kehidupannya dalam segala aspek.

Aspek *homo pancasilaus* memberikan penekanan bahwa manusia tidak bisa mengejar kenikmatan materi dalam kehidupannya. Sebaliknya, *homo pancasilaus* memusatkan dirinya kepada keberadaan Tuhan sebagai Sang Khalik. Inilah jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya yang memiliki kesadaran ketuhanan dalam kehidupan. Hal ini tentunya tidak dapat ditemukan dalam asumsi manusia sebagai *homo economicus*.

Aspek *homo pancasilaus* kemudian dijadikan dasar sebagai antitesis untuk mengatasi problematika dalam PAT dan laba (pada sudut pandang manusia). Hal ini dilakukan karena problematika laba dan PAT sejatinya berasal dari unsur manusia, yang termanifestasi dalam *homo economicus*. Hasil antitesis juga

menunjukkan karakteristik yang berbeda dari problematika PAT dan laba, terutama pada aspek materi.

Aspek *homo pancasilaus* beserta bentuk dari antitesis baru dapat terimplementasi ketika akuntansi juga memiliki roh Pancasila. Sebaliknya, akuntansi tidak dapat memiliki roh Pancasila ketika *homo pancasilaus* tidak terbentuk. Hal ini merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga terdapat konsistensi dari aspek ontologi hingga aksiologi. Oleh karena itu, manusia dan akuntansi harus memiliki roh Pancasila untuk mewujudkan peradaban seutuhnya.